

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR: B/66 / KPTS/03/2025

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT.

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran KESATU

2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini.

Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat dilakukan penambahan atau KEDUA

pengurangan berdasarkan kebutuhan dan Peraturan

Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa

pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung;

2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;

3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;

4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR: B/66/KPTS/03/2025
TANGGAL: 3 January 2025

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025

No	Judul Rancangan Peraturan Bupati	Perangkat Daerah Pemrakarsa
1	Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	1 Cilli takei Sa
2	Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo
3	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun	
	2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
4	Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
5	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Liwa	Dinas PU&PR
6	Rencana Penanggulangan Bencana	D. A. D. D. L.
7	Rencana Kontijensi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Kajian Resiko Bencana	
9	Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan	Dinas Perhubungan
10	Jalan Umum sebagai Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
11	Rencana Induk <i>Geopark</i> Kaldera Suoh	Balitbang
12	Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lampung Barat	
13	Pendelegasian Kewenangan Bupati Dibidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
14	Pedoman Cadangan Pangan Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Bencana	Dinas Ketahanan Pangar
15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
16	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Nutrisi Lansia	
17	Pusat kejahteraan sosial dan sistim layanan rujukan terpadu	
18	Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial	
19	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi BLUD	
20	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar	RSUD Alimuddin Umar
21	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Palayanan Pasar	Dinas Koperasi Ukm
22	Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	
23	Penyediaan Seragam Sekolah	

-	Penerimaan Peserta didik Baru	
25	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata pada	Dinas Pendidikan
	Satuan Pendidikan Kesetaraan	
	Beasiswa Pendidikan Seni	
-	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata	
returnation in the facility of	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026	
	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	
30	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1	
	Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	
-	Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	
32	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas	
33	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Transaksi Non Tunai	
34	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	DVAD
	Tahun Anggaran 2024	BKAD
35	Properti Investasi	
36	Pedoman Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan	
	Pelaporan Barang Milik Daerah	
37	Standar Sarana dan Prasarana Kantor dilingkungan	
	Pemerintah Daerah	
38	Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah	
	Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah	
40	Pemberian dan Pemanfataan Insentif Pemungutan	
	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
41	Penunjukan Pemungutan Pajak dan Tata Cara	
	Pemungutan, Penyetoran dan/atau Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda
42	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Opsen PKB dan BBNKB	
43	Tata Cara Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil	
	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada	
	Pemerintah Pekon	
	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	
45	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun	
	2025	Badan Perencanaan
	Penetapan Rencana Strategis 2025-2029	Pembangunan Daerah
47	Penetapan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah Tahun 2026	
	Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak	Dinas KBPP dan PA
-	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan	Dinas Perkebunan
50	Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	
51	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah	
52	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	BKP SDM
anomena ristina		

53	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun	
	2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan	
	Ujian Penyesuian Ijazah Kenaikan Pangkat	
54	Lembaga Himpun Pemekonan	
55	Perangkat Pekon	
56	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan	
	Belanja Pekon Tahun Anggaran 2025	
57	Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran	
	2025	
58	Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Pekon Kepada	
	Setiap Pekon Tahun Anggaran 2025	
59	Pedoman Pendirian Pengurusan Pengelolaan dan	
	Pemberhentian Badan Usaha Milik Desa	
60	Peratin	
61	Pemilihan Peratin	
62	Pedoman Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan	
	Pemerintahan Pekon Dalam Pembangunan Pekon	
63	Tata Cara Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai	
	Pelaksanaan APB Pekon	
64	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kubu Perahu	
	Kecamatan Balik Bukit	
65	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pada Cahya	
	Kecamatan Balik Bukit	
66	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebarus	
	Kecamatan Balik Bukit	
67	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Sugih	
	Kecamatan Balik Bukit	
68	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wates	
	Kecamatan Balik Bukit	
69	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Padang Dalom	
	Kecamatan Balik Bukit	
70	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Way Empulau	
	Ulu Kecamatan Balik Bukit	
71	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukarame	Dinas PMP
	Kecamatan Balik Bukit	
72	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bahwai	
	Kecamatan Balik Bukit	
73	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sedampah	
	Indah Kecamatan Balik Bukit	
74	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Way	
	Mengaku Kecamatan Balik Bukit	
75	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasar	
P	Liwa Kecamatan Balik Bukit	
menophent state should be	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suoh	
77	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan	
pm	Bandar Negeri Suoh	
78	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sri Mulyo	
70	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
19	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Ratu	
	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	

80	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Sari Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
Ω1	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tembelang	
01	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
82	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tri Mekar Jaya	
	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
83	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bandar Agung	
0.1	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
84	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ringin Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
85	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bumi Hantatai	•
	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
86	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Negeri Jaya	
	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
87	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Marga	
	Kecamatan Suoh	4
88	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Agung	
	Kecamatan Suoh	
89	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tugu Ratu	
	Kecamatan Suoh	
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Banding Agung	
0.1	Kecamatan Suoh	
91	1	
00	Kecamatan Suoh	
92	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rowo Rejo Kecamatan Suoh	
03		
33	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sido Rejo Kecamatan Suoh	
94	Pedoman Audit Kinerja Pada Perangkat Daerah	
	Tahun 2024	
95	Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	Inspektorat
	Pemerintah Daerah	
	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	
97	Kode Klasifikasi Arsip Dilingkungan Pemerintah	
	Daerah	
-	Arsip terjaga dan ahli media	Dinas Perpustakaan dan
-	Arsip vital	Kearsipan
100	Penyusutan Arsip Dinamis dan Statis Serta Tata Cara	
101	Pemusnahan dan Penghapusan Milik Daerah	
	Aplikasi Inlislite	
SANCES AND ADDRESS OF THE PARTY	Perubahan atas Peraturan Bunati Lampung Barat	
103	Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem	Bagian Organisasi
	Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan	
104	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun	
1	2024 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata	
	Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah	
105	Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur	
	Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah	

106	Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan	
	dilingkungan Pemerintah Daerah	
107	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun	
	2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata	
	Kerja Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan	
108	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten	
	Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang	
	Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri	Parian Danalanamian
109	Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Pesagi	Bagian Perekonomian
	Mandiri Perseroan Dalam Rangka Pengelolaan Pasar	
	Tematik Dan Kawasan Wisata Lumbok Seminung	
110	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun	
	2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor	Colombia di at DDDD
	3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan	Sekretariat DPRD
	Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	
111	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14	Bagian Kesra
	Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksana	
	Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan	
	Kesejahteraan Masyarakat	
112	Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Bagian Tata
		Pemerintahan
113	Kendaraan Dinas Operasional Sewa di	Bagian Umum
	Lingkungan Pemerintah Daerah	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK NIP. 19761020 200501 1 008